

ABSTRAK

Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dalam konteks filsafat pemidanaan pencabutan hak politik bertujuan untuk melindungi moralitas publik, menjamin bahwa pejabat publik memiliki integritas yang tinggi guna melindungi kepentingan pihak ketiga yaitu masyarakat, menjaga pilar demokrasi serta menghidupkan efek determinan dari pidana sehingga dengan demikian pencabutan hak politik bukanlah bentuk pendegradasian martabat manusia. Dalam konteks Hak Asasi Manusia pencabutan hak politik bersifat *derogable right* (dapat dibatasi) melalui proses peradilan. Pencabutan hak politik tanpa melalui mekanisme peradilan adalah *inkonstitusional*. Pencabutan hak politik dalam implementasinya terjadi disparitas antara putusan hakim tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan hukum yakni tidak adanya pedoman pemidanaan tentang pencabutan hak politik, kedudukan pidana pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif (*optional*), kelemahan substansi, pemikiran filsafat hukum hakim yang berbeda. Dalam konteks *legal institusional* terjadi konflik antara putusan Pengadilan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pencabutan hak politik adalah *inkonstitusional* bersyarat namun dalam prakteknya hakim tindak pidana korupsi menerapkan pencabutan hak politik. Solusi atas problematika konflik hukum tersebut yaitu dengan pendekatan asas kewenangan dan pendekatan asas hirarki perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sedangkan pengadilan tindak pidana korupsi hanya memutus peristiwa yang kongkrit pada level undang-undang. Dalam pengembangan sanksi pidana dimasa yang akan datang maka pencabutan hak politik ada yang berdimensi absolut dengan syarat dan ketentuan, berdimensi relatif dengan syarat dan ketentuan, berdimensi keseimbangan dengan syarat dan ketentuan dan peniadaan pencabutan hak politik dengan syarat dan ketentuan.*

Kata kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Pencabutan Hak Politik.